

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana hidrometeorologi menjadi ancaman yang terus meningkat di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Perubahan iklim mempercepat frekuensi hujan ekstrem, sementara alih fungsi lahan di kawasan perkotaan mengurangi daya serap air. Kombinasi kedua faktor ini membuat banjir menjadi jenis bencana yang paling sering terjadi di berbagai kota besar Indonesia (Andryman et al, 2024). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa banjir konsisten menempati posisi teratas dalam jumlah kejadian bencana setiap tahun, jauh melampaui gempa bumi atau tanah longsor.

Tabel 1.1 Data Kejadian Bencana di Indonesia (2022-2025)

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Bencana			
	2022	2023	2024	2025
Gempa Bumi	28	31	15	28
Erupsi Gunungapi	1	4	8	7
Cuaca Ekstrem	1.068	1.261	733	958
Kekeringan	4	174	89	37
Banjir	1.531	1.255	1.420	2.009
Tanah Longsor	634	591	207	330
Abrasi	26	33	27	28

(Sumber : GIS BNPB, 2025)

Berdasarkan data diatas, kejadian bencana di Indonesia selama periode 2022-2025 menunjukkan bahwa banjir merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi dibandingkan dengan bencana lainnya. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 1.531 kejadian banjir, kemudian mengalami penurunan menjadi 1.255 kejadian pada tahun 2023. Namun, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 1.420 kejadian pada tahun 2024 dan mencapai 2.009 kejadian pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa banjir masih menjadi ancaman bencana yang dominan di Indonesia dengan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Kota-kota besar di Indonesia menghadapi tekanan ganda dalam isu banjir. Di satu sisi, urbanisasi yang cepat menuntut pembangunan infrastruktur baru. Di sisi lain, pembangunan tersebut sering mengorbankan kawasan resapan air dan drainase alami (Dwi Arvi et al., 2025). Semarang, Surabaya, Medan, Jakarta, dan Bandung menjadi contoh kota yang berulang kali menghadapi genangan dan banjir setiap musim hujan tiba. Pola ini menunjukkan bahwa banjir bukan lagi kejadian insidental, melainkan risiko struktural yang melekat pada tata kelola perkotaan.

Persoalan banjir perkotaan juga tidak lepas dari kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola risiko. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kota dengan sistem drainase yang buruk dan koordinasi lintas sektor yang lemah cenderung mengalami dampak banjir yang lebih parah dibanding kota dengan tata kelola air yang baik. Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan banjir bukan semata persoalan teknis rekayasa sipil, melainkan juga persoalan manajemen kebencanaan yang melibatkan kebijakan, sumber daya, dan pengambilan keputusan pemerintah daerah (Manurung et al, 2024)

Kota Bandung berada tepat di tengah pusaran persoalan ini. Secara geografis, Kota Bandung terletak di dalam Cekungan Bandung, sebuah dataran tinggi purba yang dikelilingi pegunungan dan dilalui oleh Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya (Baihaqi et al., 2023). Bentuk cekungan ini membuat air hujan dari kawasan yang lebih tinggi mengalir dan berkumpul ke wilayah kota, sehingga risiko genangan meningkat setiap kali intensitas hujan tinggi.

Di dalam kota sendiri, beberapa sungai menjadi jalur utama aliran air permukaan, terutama Sungai Cikapundung yang membelah kawasan padat penduduk. Sungai ini kerap meluap ketika curah hujan tinggi terjadi baik di wilayah hulu maupun di dalam kota, dan luapannya langsung berdampak pada permukiman di sekitarnya (BNPB, 2024). Karakteristik topografi cekungan ini menjadikan Kota Bandung rentan terhadap banjir kiriman maupun banjir lokal akibat hujan setempat.

Kondisi hidrologis ini diperparah oleh perubahan tata guna lahan. Kawasan resapan air di bagian utara Kota Bandung dan sekitarnya terus berkurang akibat

pembangunan permukiman dan fasilitas komersial. Berkurangnya kawasan resapan membuat limpasan air hujan yang mengalir ke badan sungai dan saluran drainase kota semakin besar, sementara kapasitas saluran yang ada tidak selalu mengalami peningkatan sebanding (Rafdi & Kusumah, 2023). Akibatnya, genangan dan banjir dapat terjadi bahkan pada intensitas hujan yang sebelumnya masih tergolong wajar.

Fenomena ini bukan sekadar catatan teori tata ruang, melainkan kenyataan yang berulang setiap tahun. Pemantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung mengidentifikasi sejumlah titik rawan banjir yang konsisten muncul dalam laporan tahunan, antara lain kawasan Sungai Cikapundung, Gedebage, Pagarsih, Tamansari, dan Braga termasuk Gang Apandi (Burhanudin, 2025). Titik-titik ini menjadi fokus pemantauan rutin karena riwayat genangan yang berulang, terutama saat musim hujan.

Data kejadian nyata memperkuat gambaran tersebut. Pada Januari 2024, luapan Sungai Cikapundung menyebabkan banjir di Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, yang berdampak pada 600 jiwa dan 600 rumah warga, dengan sekitar 150 orang terpaksa mengungsi (BNPB, 2024). Kejadian ini hanya satu dari rangkaian peristiwa serupa yang terus berulang di kawasan yang sama maupun di titik rawan lain di dalam kota.

Data agregat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat turut mencatat tren kejadian banjir di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dari tahun ke tahun, termasuk Kota Bandung sebagai salah satu wilayah dengan frekuensi kejadian yang signifikan. Dokumen kajian risiko bencana Provinsi Jawa Barat menempatkan banjir sebagai salah satu ancaman hidrometeorologi utama yang harus mendapat prioritas penanganan (BNPB, 2022).

Tabel 1.2 Data jumlah kejadian Bencana banjir berdasarkan Kota di Provinsi Jawa Barat (2022-2025)

No	Kota	2022	2023	2024	2025
1	Cimahi	10	2	5	11
2	Bogor	11	16	16	13
3	Bandung	6	9	12	13

No	Kota	2022	2023	2024	2025
4	Bekasi	8	5	8	7
5	Sukabumi	7	9	29	16
6	Depok	7	6	5	8
7	Cirebon	9	3	5	9
8	Tasikmalaya	2	9	4	6
9	Banjar	1	1	2	4
Jumlah		61	60	86	87

(Sumber : Barata BPBD Jawa Barat)

Berdasarkan table diatas, jumlah kejadian bencana banjir di seluruh kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2022 hingga 2025. Kejadian bencana banjir yang terjadi tiap tahunnya jika dianalisis secara umum, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) faktor alam seperti curah hujan yang sangat tinggi, dengan kemampuan lingkungan menerima yang rendah, menyebabkan terjadinya banjir; (2) Sikap yang tidak peduli dan tidak ramah dengan lingkungan, juga menjadi faktor yang sangat memengaruhi terjadinya banjir, dan; (3) regulasi dan aturan dan kebijakan yang berasal pemerintah maupun pemerintah daerah, belum efektif dilaksanakan baik dalam konteks pencegahan (preventif) maupun penindakan (kuratif) (Mosshananza, 2022).

Dampak banjir di Kota Bandung tidak berhenti pada kerugian materiil berupa rumah dan fasilitas umum yang terendam. Gangguan terhadap aktivitas ekonomi warga, terhambatnya arus lalu lintas, serta risiko kesehatan akibat genangan air kotor turut menyertai setiap kejadian. Pola berulang ini menegaskan bahwa persoalan banjir di Kota Bandung memerlukan penanganan yang sistematis, bukan sekadar respons darurat setiap kali kejadian muncul.

Tabel 1.3 Dampak Kejadian Bencana Banjir Di Kota Bandung

No	Dampak	Jumlah
1	Rumah Rusak Berat	2
2	Rumah Rusak Sedang	5
3	Rumah Rusak Ringan	6
4	Terendam	1.949
5	Jiwa Terdampak	4.015
6	Mengungsi	15
7	Fasilitas Pendidikan	2

(Sumber : Barata Jabar)

Berdasarkan tabel data diatas, kejadian banjir di Kota Bandung pada sepanjang tahun 2025, dampak yang ditimbulkan meliputi 2 bangunan rusak berat, 5 rusak sedang, dan 6 rusak ringan. Selain itu, sebanyak 1.959 bangunan terendam dan 4.015 jiwa terdampak. Terdapat 15 orang mengungsi dan pada sektor Pendidikan, 2 fasilitas Pendidikan terdampak.

Dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana masih perlu ditingkatkan. Apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa adanya langkah penanganan yang efektif, maka potensi dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di Kota Bandung akan semakin besar.

Dalam kerangka hukum penanggulangan bencana di Indonesia, tanggung jawab utama penanganan risiko bencana di tingkat daerah berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan tugas mengoordinasikan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana secara terencana dan terpadu (Manurung et al., 2024).

Peran BPBD dalam konteks ini idealnya mencakup tiga aspek sekaligus, yaitu perumusan kebijakan yang tepat sasaran, penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, serta penggerakan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko (Putri et al., 2021). Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menentukan sejauh mana penanganan banjir dapat berjalan efektif di lapangan.

Selain penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, upaya pengurangan risiko bencana juga memerlukan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat sebagai bagian dari strategi mitigasi. Penanggulangan bencana tidak hanya berorientasi pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi harus dimulai sejak tahap prabencana melalui kebijakan yang mampu membangun budaya kesiapsiagaan masyarakat (Suparman, 2021). Kesiapsiagaan merupakan elemen penting dalam penanggulangan bencana karena dapat meningkatkan kemampuan individu

maupun kelompok dalam mengantisipasi, merespons, dan mengurangi dampak bencana secara lebih efektif.

Saat ini pemerintah daerah berfokus pada pengawasan jalannya tugas dan peran BPBD yang bertanggungjawab terhadap penanggulangan bencana, setelah itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat menentukan program yang akan dijalankan untuk menanggulangi bencana di Kota Bandung. Koordinasi dan relasi yang baik juga harus terbangun antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan juga Masyarakat (Monica & Hazzah, 2023). Namun strategi penanggulangan bencana yang diterapkan belum sesuai dengan harapan, faktor penghambat yang membuat BPBD belum optimal saat terjadinya bencana dilapangan. Tahap penanggulangan bencana yang dimulai pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat/bencana, dan pasca bencana seharusnya sudah diterapkan oleh pemerintah daerah yang sepenuhnya bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana.

Dampak bencana seperti di atas menandakan bahwa kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap bencana jika keadaan seperti ini terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian maka akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat di Kota Bandung. Untuk mengatasi permasalahan bencana banjir di Kota Bandung, oleh karena itu dibentuknya BPBD memberikan pengaruh besar terhadap Penanggulangan Bencana. Berbagai program upaya pencegahan Bencana yang sangat penting dalam penanggulangan Bencana dilakukan agar penanganan Bencana dapat terencana dan menyeluruh serta mengetahui apa saja penghambat dalam menanggulangi Bencana di Kota Bandung.

Dalam permasalahan di atas, penulis memberikan pandangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Optimalisasi peran badan penanggulangan bencana menjadi salah satu metode pilihan dalam meningkatkan penanganan bencana secara terkoordinir dan jelas. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya optimalisasi penanggulangan bencana oleh BPBD di Kota Bandung.

Berdasarkan uraian latar belakang, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai **“OPTIMALISASI PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM UPAYA MENGURANGI RISIKO BENCANA BANJIR DI KOTA BANDUNG.”**

Secara struktural, Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur pengarah dan unsur pelaksana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Unsur pengarah bertugas memberikan arahan strategis dalam perumusan kebijakan penanggulangan bencana, sedangkan unsur pelaksana menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai pemulihan pascabencana. Struktur ini dirancang agar kebijakan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan tetap berjalan beriringan.

Dalam praktiknya, efektivitas struktur tersebut sangat bergantung pada kapasitas unsur pelaksana di tingkat kota, karena unit inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan kondisi lapangan setiap kali banjir terjadi. Ketimpangan antara arahan strategis dan kemampuan pelaksanaan teknis inilah yang mendorong pentingnya kajian mengenai optimalisasi peran BPBD Kota Bandung secara lebih terperinci.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pencapaian tujuan BPBD Kota Bandung dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir, yang ditunjukkan oleh masih terjadinya banjir berulang di beberapa wilayah serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan masyarakat dan risiko banjir belum tercapai secara maksimal.
2. Belum optimalnya pelaksanaan alternatif keputusan yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandung dalam mengurangi risiko banjir.
3. Masih terdapat keterbatasan sumber daya yang menghambat optimalisasi

penanggulangan banjir, baik sdm, anggaran, maupun sarana prasarana, yang menghambat optimalisasi penanggulangan banjir oleh BPBD Kota Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah, antara lain:

1. Bagaimana tujuan BPBD dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir di Kota Bandung?
2. Bagaimana alternatif keputusan BPBD dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir di Kota Bandung?
3. Bagaimana sumber daya yang dibatasi BPBD dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir di kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan BPBD dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis alternatif keputusan BPBD dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis sumber daya yang dibatasi BPBD dalam upaya mengurangi risiko bencana banjir di Kota Bandung.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Administrasi Publik. Terkait kajian optimalisasi peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan teori optimalisasi kelembagaan (Machfud Sidik, 2002) pada konteks empiris penanggulangan banjir di wilayah perkotaan, sehingga memperluas pemahaman mengenai hubungan antara kapasitas kelembagaan, koordinasi, dan efektivitas pengurangan risiko bencana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pihak-pihak terkait antara lain:

- a. Bagi BPBD Kota Bandung, memberikan masukan bagi BPBD Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas peran dan kinerja kelembagaan dalam penanggulangan banjir.
- b. Bagi Pemangku Kebijakan (Pemerintah Daerah), sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan penguatan koordinasi lintas sektor terkait pengurangan risiko banjir.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih ramah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pelayanan yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap birokrasi akan meningkat dan kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat terwujud.
- d. Bagi peneliti lain, Menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji optimalisasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana di wilayah perkotaan.

F. Kerangka Berpikir

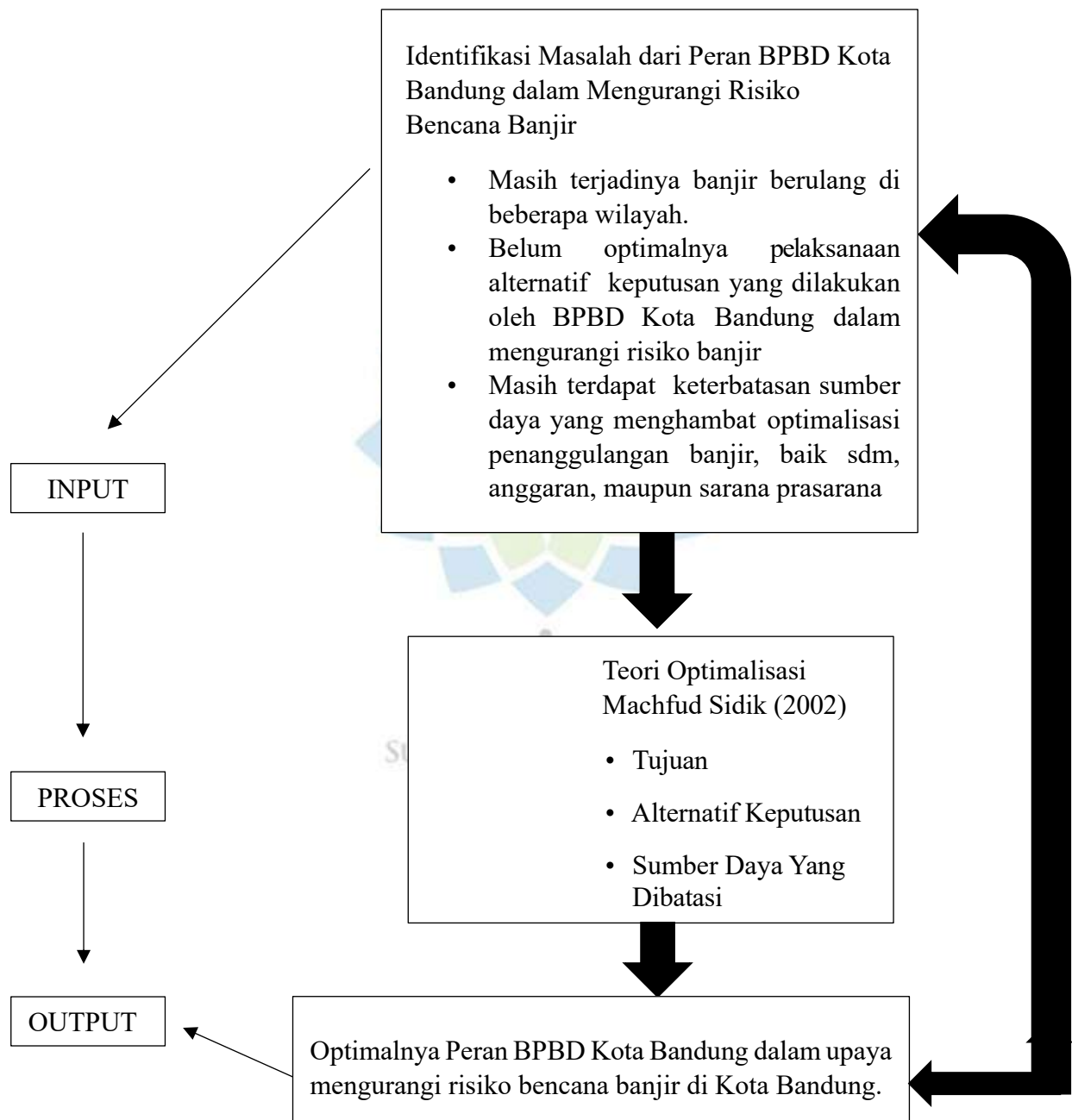
Fenomena meningkatnya risiko bencana banjir di wilayah perkotaan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh dinamika tata kelola pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif administrasi publik, penanggulangan bencana dipahami sebagai bentuk pelayanan publik strategis yang menuntut responsivitas, koordinasi lintas sektor, serta orientasi pada nilai publik. BPBD Kota Bandung berperan sebagai institusi kunci yang mengoordinasikan berbagai aktor dan sumber daya dalam seluruh siklus manajemen bencana, mulai dari mitigasi hingga pemulihan. Namun, kompleksitas risiko banjir perkotaan menuntut optimalisasi peran BPBD agar mampu menjalankan fungsi kelembagaannya secara efektif dan berkelanjutan.

Kerangka berpikir penelitian ini mengaitkan teori optimalisasi organisasi

(Machfud Sidik, 2002) untuk memahami bagaimana peran BPBD dijalankan dalam praktik. Fokus kajian diarahkan pada proses optimalisasi peran BPBD dalam pengurangan risiko banjir, yang diturunkan ke dalam subfokus kelembagaan dan pelayanan publik. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna, pengalaman, serta praktik kelembagaan para aktor terkait dalam konteks nyata penanggulangan banjir. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, penelitian ini berupaya memahami proses, dinamika, serta interpretasi para pelaku kebijakan terhadap upaya optimalisasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana BPBD menjalankan perannya dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik kebencanaan.



Lebih lanjut peneliti paparkan pada alur kerangka berpikir di bawah ini.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2026)